

## PROGRAM SAMANTA 2008-2009

# PROGRAM TATA KELOLA KEHUTANAN, KEMISKINAN & PERUBAHAN IKLIM (*Forestry Governance, Poverty & Climate Change Program*) DI NUSA TENGGARA



## Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA)

### **Sekretariat Pusat:**

Jl. Surabaya No. 5 Taman Baru  
Mataram 83121 NTB  
Telp/Fax: 0370-636602  
Email: [nusatenggara@samantafoundation.org](mailto:nusatenggara@samantafoundation.org)  
Web site: [www.samantafoundation.org](http://www.samantafoundation.org)

### **Sekretariat NTT :**

Jl. Ade Irma Suryani II No. 30  
Walikota Baru Kupang NTT  
Telp/Fax : 0380-825028  
Email : [samantantt@telkom.net](mailto:samantantt@telkom.net)

## *Kata Pengantar*

**S**ATU ISU penting dalam pembangunan sektor kehutanan adalah bagaimana kebijakan kehutanan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan sekaligus tetap berorientasi pada pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Lebih tegasnya adalah bagaimana masyarakat sekitar hutan memiliki akses legal dan berperan aktif dalam mengelola sumber daya hutan. Isu ini juga dapat dijumpai pada dokumen-dokumen resmi perencanaan pembangunan kehutanan baik di tingkat nasional (Departemen Kehutanan) maupun daerah (Dinas Kehutanan).

Paling tidak terdapat 4 topik yang didorong Samanta terkait dengan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, yaitu :

1. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai varian pengelolaannya, terutama HKM dan hutan tanaman rakyat.
2. Usaha mikro dan kecil (*micro and small enterprise*) bagi masyarakat di sekitar hutan
3. *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD).
4. Sistem verifikasi sahnya kayu (*Timber Legality Assurance System*)

Ada beberapa strategi yang dikembangkan Samanta dalam mengusung ke 4 topik di atas. **Pertama**, memfasilitasi kerja-kerja multi pihak (*multi-stakeholders partnership*) dari kalangan lembaga pemerintah, LSM, perguruan tinggi, sector privat dan kelompok masyarakat. **Kedua**, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, terutama masyarakat di sekitar hutan. **Ketiga**, memfasilitasi peningkatan kapasitas para pihak.

Program Tata Kelola Kehutanan, Kemiskinan & Perubahan Iklim (*Forestry Governance, Poverty & Climate Change Program*) di Nusa Tenggara periode 2008-2009 di dukung oleh *Partnership for Governance Reform* (PGR) dan *Multi-stakeholders Forestry Program* (MFP). Target beneficiary sekurang-kurangnya meliputi 350 kelompok masyarakat dan 10.000 KK yang berada di 50 desa dan 8 kabupaten di Nusa Tenggara.

Program ini meliputi ketiga skema kegiatan. **Pertama**, fasilitasi mitra untuk dukungan PSDHBM, KPH, usaha mikro dan kecil dan SVLK. Saat ini Samanta memberi dukungan kepada 20 proyek mitra (LSM, kelompok masyarakat dan lembaga kolaborasi). **Kedua**, pengembangan *fund raising* Samanta. **Ketiga**, fasilitasi *knowledge management* bagi mitra-mitra Samanta.

Akhirnya, Samanta menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberi dukungan sehingga program ini tersusun.

**Mataram, Maret 2009**

**Dwi Sudarsono**  
**Direktur**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
<b>PROFIL SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS SAMANTA</b>	
1. Sejarah.....	1
2. Nilai-nilai/Prinsip-prinsip .....	2
3. V i s i .....	2
4. M i s i .....	2
5. Tujuan Strategis Umum .....	3
6. Tujuan Strategis Khusus .....	3
<b>Program Tata Kelola Kehutanan, Kemiskinan &amp; Perubahan Iklim (Forestry Governance, Poverty &amp; Climate Change Program) di Nusa Tenggara 2008 – 2009</b>	
<b>I. GAMBARAN SITUASI</b>	
1. Konteks Kondisi dan Situasi .....	4
2. Isu-isu Strategis .....	10
3. Tantangan-tantangan .....	15
4. Proyek-proyek Sebelumnya dan Yang Relevan .....	15
5. Intervensi Strategi .....	17
6. Para Mitra dan Pihak yang Mendapat Manfaat .....	18
7. Analisa Resiko .....	19
<b>II. PELAKSANAAN PROYEK</b>	
1. Kerangka Kerja Legal .....	21
2. Deskripsi Kegiatan .....	21
3. Pengaturan Pelaksanaan Proyek .....	23
<b>III. LOKASI .....</b>	<b>25</b>
<b>IV. ANGGARAN .....</b>	<b>25</b>
<b>IV. WAKTU .....</b>	<b>25</b>

## PROFIL SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS *SAMANTA*

### 1. Sejarah

*Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA)* merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berbentuk yayasan dimana fokus kegiatannya diarahkan pada upaya penggalangan dana dan pelayanan pendanaan alternatif skala kecil (*small grant*). Upaya penggalangan dan pelayanan pendanaan alternatif tersebut diarahkan untuk mendukung program/kegiatan yang dilakukan oleh mitra dalam menanggulangi kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam di Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur). Semua upaya itu dilakukan dengan mengedepankan kaidah layanan yang cepat, tepat, mudah diakses dan berkesinambungan.

*SAMANTA* dirintis sejak Mei 2004. Pada Mei 2004, sejumlah LSM lokal dan nasional, pemerintah, perguruan tinggi dan wakil kelompok masyarakat dan beberapa lembaga donor bertemu dan berkonsultasi dengan mitra-mitra se-Nusa Tenggara di Mataram NTB. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas dan membangun pemahaman bersama tentang konsep dan mekanisme pendanaan alternatif dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan pengelolaan SDA berbasis kemitraan. Selama pertemuan/konsultasi berlangsung, muncul kesepakatan pentingnya pengembangan lembaga mandiri di tingkat regional untuk melakukan penggalangan dana publik untuk pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Lembaga mandiri tersebut berupa lembaga yayasan masyarakat atau *Regional Community Foundation (RCF)*.

Kesepakatan pertemuan di atas kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan konsep program dan kelembagaan oleh Tim 7. Berbagai konsultasi dan *focus group discussion* juga dilakukan baik di NTB maupun NTT untuk mematangkan program dan kelembagaan *SAMANTA*. Peserta yang dilibatkan juga beragam dari kalangan pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif), LSM, pengusaha, masyarakat dan akademisi serta wartawan. Kegiatan ini juga sekaligus bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan *SAMANTA*.

Semua upaya dilakukan dengan harapan agar *SAMANTA* menjadi lembaga "milik publik" sebagaimana menjadi mandat pada pertemuan awal pembentukan *SAMANTA*. Para penggagas menyadari bahwa dukungan publik menjadi sangat signifikan didalam mengembangkan *SAMANTA* ke depan. Melalui sebuah pergelaran lokakarya, peserta lokakarya mendirikan dan mendeklarasikan pembentukan *SAMANTA* pada 24 September 2005 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

## 2. *Nilai-nilai/Prinsip-prinsip*

Dalam menjalankan organisasi, *SAMANTA* berlandaskan dan menganut pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Inklusif**, yaitu *SAMANTA* merupakan bagian dari kepentingan masyarakat/publik.
- b. **Berkeadilan**, yaitu *SAMANTA* menghindari hak-hak istimewa dan semua diperlakukan sama dan semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama.
- c. **Ber-kemitraan dan berkesetaraan**, yaitu *SAMANTA* mengutamakan kerjasama dan kesamaan kedudukan dengan mengedepankan prinsip berbagi kekuasaan, sumber daya dan tanggung jawab.
- d. **Transparan dan akuntabel**, yaitu setiap orang berhak mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kinerja dan kegiatan *SAMANTA*.
- e. **Partisipatif dan demokratis**, yaitu *SAMANTA* mengutamakan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan program.

## 3. *Visi*

Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penggalangan dan pengembangan pendanaan alternatif

## 4. *Misi*

- a. Melakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan yang terpinggirkan dan masyarakat sipil.
- b. Mendorong terselenggaranya sistem dan tata kelola SDA dan lingkungan yang baik dan berkeadilan (*good environmental governance*)
- c. Melakukan dan memfasilitasi penggalangan dan dukungan pendanaan alternatif yang mudah diakses oleh mitra baik LSM maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.
- d. Mendorong pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan dan pilantropi (kedermawanan) bagi pemberdayaan masyarakat miskin dan pengelolaan SDA dan lingkungan.

## 5. *Tujuan Strategis Umum*

Mengembangkan skema pendanaan alternatif yang berkelanjutan untuk menunjang program pengentasan kemiskinan dan pengelolaan SDA berbasis kemitraan di Nusa Tenggara.

## 6. *Tujuan Strategis Khusus*

- a. Meningkatkan kemandirian mitra-mitra *SAMANTA*
- b. Memastikan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.
- c. Meningkatkan dukungan sumberdaya dari para pihak diluar sektor swasta dan upaya-upaya penggalangan pendanaan mandiri.
- d. Menyediakan layanan pendanaan alternatif yang berkelanjutan dan mudah diakses.
- e. Meningkatkan dukungan bagi skema kemitraan antara perusahaan dan organisasi masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat sipil dan pengelolaan SDA dan lingkungan.
- f. Mengarusutamakan gerakan filantropi (kedermawanan) dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan pengelolaan SDA dan lingkungan.

# Program Tata Kelola Kehutanan, Kemiskinan & Perubahan Iklim (*Forestry Governance, Poverty & Climate Change Program*) di Nusa Tenggara 2008 – 2009

## I. Gambaran Situasi

### 8. Konteks Kondisi dan Situasi

Luas wilayah daratan Propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 47.349,9 Km<sup>2</sup> dan NTB 6.643,98 Km<sup>2</sup>. Karakter geografi Propinsi NTT dan NTB tidak berbeda jauh dengan wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau kecil dan mikro sekitar 600 buah. Pada 2007 jumlah penduduk di kedua propinsi mencapai sekitar 8,5 juta jiwa dengan proporsi hampir berimbang. Untuk skala nasional, Nusa Tenggara digolongkan sebagai salah satu daerah kantong kemiskinan. Secara statistik, kemiskinan di NTT mencapai 27,86 % dan NTB 25,38 % (2006).

Angka kemiskinan NTB dalam 3 tahun terakhir belum mengalami penurunan cukup signifikan. Pada 2001 angka kemiskinan NTB mencapai 30,43 % dan menurun pada angka 24,94 % pada 2005. Namun, angka kemiskinan kembali naik pada angka 25,38 % pada 2006. Dari tahun-ketahun, angka kemiskinan terbesar disumbangkan oleh Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, masing-masing sebesar 231.110 jiwa, 216.655 jiwa dan 269.585 jiwa pada 2007.

Sementara angka kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan angka lebih tinggi dibanding NTB. Secara berturut-turut angka kemiskinan NTT dalam tiga tahun terakhir sebesar 28,19 % pada 2005, 27,74 % pada 2006 dan 27,58 pada 2007. Dengan demikian penurunan angka kemiskinan di propinsi ini berjalan lamban dari tahun ke tahun.

Persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara bukan saja disebabkan oleh persoalan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baik di sector pertanian, manufaktur maupun jasa. Namun, kemiskinan di wilayah ini juga disebabkan oleh terbatasnya akses penguasaan sumber daya alam dan merosotnya daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara tergantung pada sektor pertanian dengan tingkat ketergantungan secara langsung terhadap sumber daya alam cukup tinggi, terutama sumber daya hutan.



Mari kita lihat kondisi hutan di NTB dan NTT. Luas hutan NTB mencapai 1.098.044,08 ha atau sekitar 54 % luas wilayah daratan (2.015.315 ha). Hutan NTB didominasi hutan lindung, yaitu 454.594,23 ha (41,46 %), disusul hutan produksi terbatas 298.809,96 ha (27,26 %) dan hutan produksi tetap 143.024,76 ha (13,04 %). Berdasarkan Surat Gubernur NTB No. 522/265/Dishut/Plan, 2002, tata guna hutan kesepakatan di NTB disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Nusa Tenggara Barat**

NO	Tata Guna Hutan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Hutan Lindung	454.594,23	41,46
2	Hutan Produksi		
	a. Hutan produksi tetap	143.024,76	13,04
	b. Hutan produksi terbatas	298.809,96	27,26
	c. Hutan produksi yang dapat dikonversi	28.395,00	2,59
3	Hutan Konservasi		
	a. Taman nasional	41.330,00	3,78
	b. Cagar Alam	36.382,51	3,32
	c. Taman Buru	48.668,15	4,44
	d. Suaka Margasatwa	21.674,68	1,95
	e. Taman Wisata Alam	11.354,20	1,04
	f. Taman Hutan Raya	8.969,00	0,83
	g. Taman Wisata laut	3.155,00	0,29
	<b>Total</b>	<b>1.098.044,08</b>	<b>100</b>

Sumber : Surat Gubernur NTB No. 522/265/Dishut/Plan, 2002

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 423/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang hasil pepaduserasian RTRWP dan TGHK, kawasan hutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.808.990 Ha yang pembagiannya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Nusa Tenggara Timur**

NO	Tata Guna Hutan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Hutan Produksi		
	a. Hutan produksi tetap	428.357,98	23,8
	d. Hutan produksi terbatas	197.249,73	10,9
	e. Hutan produksi yang dapat dikonversi	101.827,03	5,6
2	Kawasan Lindung		
	a. Hutan lindung	731.216,97	40,5
	b. Taman nasional	59.058,53	3,3
	c. Cagar Alam	66.653,25	3,6
	d. Taman Buru	5.850,67	0,3
	e. Suaka Margasatwa	18.961,81	1
	f. Taman Wisata Alam	159.154,76	8,8
	g. Hutan bakau/mangrove	40.695,54	2,2
	<b>Total</b>	<b>1.808.990</b>	<b>100</b>

Potret merosotnya daya dukung lingkungan hutan di Nusa Tenggara dapat dilihat dari luasan lahan kritis. Di satu sisi, pemulihan kondisi lingkungan hutan masih berjalan lambat. Hal ini dapat dilihat dari luasan lahan kritis yang pemulihannya belum menunjukkan perbaikan berarti. Pada 2006, lahan kritis NTB mencapai 527.963 ha atau sekitar 25,5 % dari luas NTB, terdiri dari lahan

kritis di dalam kawasan hutan 159.344 ha (7,91 %) dan luar kawasan 368.619 ha (18,29 %).

**Tabel Lahan Kritis Lahan Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2006**

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Ha)	Lahan Kritis		Total
			Dalam Kawasan (Ha)	Luar Kawasan (Ha)	
1	Lombok Barat	164.915	13.647	24.187	37.834
2	Lombok Tengah	142.765	4.403	31.562	35.965
3	Lombok Timur	160.555	7.229	39.652	46.881
4	Sumbawa	849.300	51.125	142.873	193.998
5	Dompu	232.455	26.141	56.781	82.922
6	Bima	459.690	56.797	73.562	130.360
	<b>Jumlah</b>	<b>2.015.315</b>	<b>159.344</b>	<b>368.619</b>	<b>527.963</b>

Sumber : Dishut NTB, 2006

Kondisi hutan di NTB semakin mengkhawatirkan jika dilihat dari lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS). Di NTB terdapat 18 DAS yang kondisinya kritis hingga sangat kritis. Luas lahan kritis di DAS NTB cukup tinggi, yaitu meliputi 71.59 % wilayah DAS di Pulau Lombok dan 70.09 % wilayah DAS Pulau Sumbawa. Sementara tingkat bahaya erosi (TBE) DAS NTB tergolong berat, mencakup; 85.52% wilayah DAS di Pulau Lombok dan 80.99% wilayah DAS di Pulau Sumbawa. Khusus di Sumbawa, hutan kritis mencapai 60,4 % dari luas hutan 519.529.524 ha dengan tingkat penyempitan lahan mencapai 1.000 ha/tahun. Tidak mengherankan jika hutan tropis asli di Sumbawa tinggal 39,6 % (Dishut NTB, 2002). Sementara lahan hutan kritis di Lombok Barat menduduki tingkat paling tinggi dibanding dengan kabupaten lain di NTB, yaitu mencapai 14,5 ribu ha (Dishut NTB, 2002).

Di sisi lain, NTB mengalami persoalan supply air, terutama di Pulau Lombok. Dari 4 Daerah Aliran Sungai (Jelateng, Dodokan, Putik dan Menanga), 2 lainnya mengalami defisit neraca supply air, yaitu DAS terbesar Dodokan dan Menanga dengan angka defisit minus 2.156,89 mcm dan minus 258,15 mcm. Sementara Pulau Lombok sendiri mengalami defisit ketersediaan air sebesar minus 1.178,45 mcm sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

NO	NAMA DAS	LUAS (KM2)	JML PENDDUK	POTENSI (MCM)	PEMANFAATAN (MCM)	NERACA
1	JELATENG	502	110.093	194	72,81	121,19
2	DODOKAN	2.027	1.930.776	1.266	3.422,89	-2.156,89

3	PUTIK	1.197	286.469	1.429	313,60	1.115,40
4	MENANGA	1.013	584.757	702	960,15	-258,15
	P. LOMBOK	4.739	2.912.095	3.591	4.769,45	-1.178,45

Sumber : Balai Hidrologi dalam WWF Nusra, 2007

Pada 1985 jumlah mata air sebanyak 702 mata air. Pada 2000 mata air di NTB tinggal 262 buah dimana 40 di antaranya dalam keadaan mati suri. Hal ini berarti NTB telah kehilangan mata air sebanyak 440 mata air dalam kurun waktu 15 tahun (Bappeda NTB dalam WWF Nusa Tenggara, 2004). Misalnya di Lombok, beberapa sungai mengalami penurunan dibet air dalam kurun waktu tahun 1992 sampai 2002. Tabel berikut menunjukkan kecenderungan itu.

Nama Sungai	Debit tahun 1992 (m3/detik)	Debit tahun 2002 (m3/detik)
Aiknyet	27,3	10,37
Babak	8,436	5,68
Sesaot	16,08	9,096

Sumber : Balai Hidrologi dalam WWF Nusa Tenggara, 2004.

NTB bukan saja akan berpotensi mengalami krisis air, namun juga krisis ketersediaan kayu. Kebutuhan kayu bangunan NTB mencapai 80.000 M3/tahun kayu dan 400.000 M3/tahun kayu bakar (Dishut NTB, 2007). Sementara supply IPKTM dan kayu bakar dari luar daerah hanya 30.000 m3/tahun setara dengan (jeda tebang 10 tahun). Sedangkan pemenuhan kebutuhan kayu tidak mungkin lagi disupply dari hutan saat ini mengingat kondisi hutan semakin terdegradasi. Disinilah latak persoalannya, ketika supply kayu terbatas dan kebutuhan kayu meningkat serta ditambah lagi dengan kondisi kemiskinan, maka sumber daya hutan akan mengalami tekanan. Praktik *illegal logging* akan semakin marak dan perambahan hutan juga berpotensi semakin meluas.

Kondisi hutan dan DAS di NTT juga tidak lebih baik dibanding dengan NTB. Di NTT lahan kritis di dalam hutan mencapai 661.680,74 ha. Bahkan Dinas Kehutanan NTT mengidentifikasi lahan kritis mencapai 1,5 juta. Potret kemerosotan lingkungan juga terlihat dari lahan kritis di DAS. NTT memiliki cukup banyak DAS, yaitu 27 buah yang terbagi ke dalam 3 DAS prioritas. DAS prioritas I sebanyak 4, yaitu Benain, Noelmina, Aissesa, dan



Doc. Sedimentasi sungai DAS Noelmina

Kambaneru. DAS prioritas II sebanyak 22 buah terdiri dari Oeasao, Waereo, Muke, Wae Moke, Kandahang, Mena, Nanka Rea, Kalionga, Lowo Rea, Tidas, Sabu, Polapare, Nggongi, Watumbekar, Melolo, Kolang Kuning, Magepanda, Karendi, Rote, Dondo, Naugalima dan Bukapiting.

Sedangkan DAS prioritas III sebanyak 1 buah yaitu DAS Balanjir. DAS prioritas I, Benain dan Noelmina, justru mengalami kerusakan. Kedua DAS ini diperkirakan akan peningkatan kerusakan untuk masa mendatang (WWF Nusra, 2004).

Daya dukung lingkungan DAS Benain dan Noelmina yang merupakan prioritas I ini makin mengalami kemerosotan. Lahan kritis DAS Benain mencapai 71.59 % dan Noelmina 70.09 %. Sementara, tingkat bahaya erosi (TBE) DAS Benain-Noelmina tergolong tinggi, yaitu DAS Benain 85.52% dan DAS Noelmina 80.99%. Pada 1981 lahan kritis DAS Noelmina seluas 158.125 ha dan berdasarkan perhitungan citra landsat bertambah ke angka 208.728 ha pada 2003. Hal ini berarti bahwa selama kurun waktu 22 tahun, lahan kritis DAS Noelmina mengalami penambahan seluas 50.603 ha atau 2.300 ha/tahun. Jika, tidak ada perbaikan dan lahan kritis terus bertambah, maka seluruh DAS Noelmina akan menjadi lahan kritis pada tahun 2013. Kondisi DAS Benain juga tidak sebaik DAS Noelmina. Pada tahun 1981 lahan kritis di DAS Benain mencapai 119.876 ha. Lahan kritis di DAS ini mengalami peningkatan seluas 375.836 ha pada tahun 2003. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan lahan kritis dalam jangka waktu 22 tahun di DAS Benain, yaitu seluas 255.960 ha atau mencapai 11.635 ha/tahun (WWF Nusra, 2004).



Doc. Samanta. Kebakaran hutan NTT

Data tentang lahan kritis di DAS Benain dan Noelmina diperkuat lagi dengan data Dinas Kehutanan Provinsi NTT. Dinas Kehutanan NTT mencatat laju penambahan lahan kritis di NTT sepanjang 20 tahun mencapai 15.163,65 ha/tahun. Sementara kemampuan rehabilitasinya hanya seluas 3.615 ha/tahun. Daya dukung lingkungan juga diperburuk lagi

dengan aktivitas pembakaran, terutama untuk perladangan.

Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dengan pola HKm. Pada tahun 2009, Pemerintah Pusat menargetkan HKm seluas 139.229,86 ha di Nusa Tenggara. Target luas HKm di daerah NTB mencapai sekitar 35.711 ha yang menyebar di berbagai kabupaten di antaranya Lombok Barat 2.973,70 ha, Lombok Tengah 2.208,00 Ha, Lombok Timur 750,00 Ha, Sumbawa 18.658,64 ha, Dompu 6.016,00 ha dan Bima 5.863,00 ha. Sedangkan target HKm di NTT lebih luas, yaitu 96.322,52 ha yang tersebar di Kodya Kupang 50.000 ha, Kabupaten Kupang 26.904 ha, Sumba Timur 500 ha, Alor 500 ha, Sikka 19.418,52 ha, TTS 5.896 ha dan TTU 300 ha.

**Tabel Target Luas HKm di NTB dan NTT Tahun 2009**

Propinsi	Kabupaten	Luas
NTB	1. Kab. Lombok Barat	2.973,70
	2. Kab. Lombok Tengah	2.208
	3. Kab. Lombok Timur	750
	4. Kab. Sumbawa	18.658,64
	5. Kab. Dompu	6.016
	6. Kab. Bima	5.863

		<b>35.711,34</b>
<b>NTT</b>	<b>7. Kodya Kupang</b>	50.000
	<b>8. Kab. Kupang</b>	26.904
	<b>9. Kab. Sumba Timur</b>	500
	<b>10. Kab. Alor</b>	500
	<b>11. Kab. Sikka</b>	19.418,52
	<b>12. Kab. Timor Tengah Selatan</b>	5.896
	<b>13. Kab. Timor Tengah Utara</b>	300
		<b>103.518,52</b>
	<b>Total NTB + NTT</b>	<b>139.518,52</b>

Sumber : Departemen Kehutanan 2008

Secara keseluruhan target HKm di Nusa Tenggara seluas 139.518,52 ha terdiri dari 35.711,34 ha di NTB dan 103.518,52 di NTT. Target luas HKm di NTT terluas dibandingkan dengan luas target HKm propinsi lain di Indonesia, disusul Lampung 85.280,21 ha, Banda Aceh 56.880 ha, NTB 35.711,34 ha dan Kalimantan Barat 25.721 ha.

Nusa Tenggara memiliki pengalaman pengembangan PSDHBM cukup lama. Paling tidak dapat dilihat dari inisiatif LP3ES NTB dalam mengembangkan HKm di Lombok Barat pada sejak awal 1990. Sedangkan praktik uji coba HKm dimulai pada 1993 di desa Sesaot Lombok Barat. Pengembangan HKm di NTB dimulai pada 1993 saat dilakukan uji coba HKm di kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat seluas 0.25 ha. Karena dinilai berhasil, uji coba HKm di Sesaot diperluas menjadi 236 ha. HKm Sesaot ini kemudian dikembangkan lagi di beberapa lokasi di Lombok, seperti HKm bantuan OECF di Sambelia Lombok Timur seluas 500 Ha, Sekotong Lombok Barat 750 ha, Batu Kliang Utara Lombok Tengah 1.024 ha dan HKm uji coba di desa Santong sampai Akar-akar Lombok Barat mencapai 721 ha. Pengembangan HKm semakin digalakkan menginjak paska era reformasi di NTB.

Pengembangan HKm di NTT tidak semarak di NTB. Sebenarnya cukup banyak inisiatif PSDHBM baik yang dilakukan LSM maupun Pemerintah di NTT. Namun persoalannya adalah skema PSDHBM yang dikembangkan belum jelas, apakah model PSDHBM berupa HKm, HTR, hutan adat dan sebagainya. Tidak mengherankan, meskipun masyarakat telah didampingi mengelola kawasan hutan cukup lama, mereka belum memiliki kepastian hukum hak kelola, karena skema PSDHBMnya belum jelas.

Pertemuan konsolidasi perluasan penyelenggaraan HKm bulan Agustus 2008 di Mataram memperlihatkan bahwa target HKm Pemerintah seluas 400 ha pada 2009 masih jauh dari target demikian pula dengan HTR. Tidak dipungkiri kalangan CSO dan Pemda masih lamban dalam memanfaatkan peluang tersebut. Sementara, di beberapa daerah ada indikasi skema HTR dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Di samping itu, kontrak pertambangan (KP) juga semakin marak baik di hutan produksi maupun hutan lindung, seperti kasus di Lombok, Sumbawa dan Lembata.

Isu perubahan iklim dengan skema REDD juga menjadi menjadi mainstream disektor kehutanan, terutama setelah COP 13 di Bali. Namun paska COP 13 menimbulkan kegelisahan di kalangan pegiat lingkungan. Hal ini menyangkut pertanyaan bagaimana posisi inisiatif CBFM dan masyarakat di sekitar hutan dalam skema REDD. Untuk itu, pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah membangun kesepahaman para pihak tentang REDD dan bagaimana memastikan inisiatif-inisiatif lokal diakomodasi didalamnya, seperti HKm, HTR, hutan adat, hutan desa, hutan rakyat dan sebagainya.

Samanta sebagai lembaga yang konsern pada sumber daya alam dan kemiskinan mencoba berperan dalam membangun inisiatif local mendorong CBFM. Pada 2006 – 2008 dengan dukungan DFID Multistakeholder Forestry program (MFP), Samanta memfasilitasi *small grant* bagi 25 mitra local yang memiliki proyek inovatif dan patut didukung. Kemudian sejak 2007, Samanta bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform* (Kemitraan) mengembangkan program “**Program Kemitraan untuk Mendukung Reformasi Kebijakan Kehutanan, Penguatan Kelembagaan, dan Perbaikan Penghidupan di Nusa Tenggara**”. Program ini melibatkan 18 mitra lokal baik LSM, lembaga pemerintah maupun kelompok masyarakat.

## 9. Isu-isu Strategis

Isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan, penanggulangan kemiskinan dan perubahan iklim adalah sbb :

### 2.1. Akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan masih lemah.

Mayoritas masyarakat Nusa Tenggara bermata pencaharian sebagai petani baik di dataran rendah maupun tinggi. Sehingga sumber daya pertanahan menjadi modal penting di dalam menopang kehidupan mereka. Dalam kenyataannya, tingkat kepemilikan dan penguasaan mereka atas sumber daya pertanahan masih terbatas. Salah satunya dilihat dari rendahnya tingkat rata-rata kepemilikan tanah setiap keluarga.

Di Lombok, terutama Lombok Timur, rata-rata kepemilikan tanah hanya berkisar 0,2 ha/kk. Sementara, sekitar 56 % penduduknya tidak memiliki tanah. Mereka bekerja sebagai petani penggarap dan buruh tani. Rata-rata kepemilikan tanah di Sumbawa cukup signifikan, yaitu 1-2 ha/KK. Namun jumlah lahan produktifnya sempit sehingga sebagian besar lahannya merupakan lahan kering atau tadah hujan. Dalam sakala propinsi, lahan kering di NTB mencapai 1.788.463 ha (termasuk di dalam hutan 528.000 ha) sedangkan NTT 4.510.183 ha (95 % luas wilayah NTT).

Keterbatasan masyarakat atas sumber daya pertanahan itu mendorong mereka mencari alternatif sumber daya lain yang salah satunya sumber daya hutan. Karena hutan memang merupakan salah satu penyedia kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Mereka melakukan perambahan hutan untuk lahan pertanian dan *illegal logging*. Konflik atas sumber daya hutan kemudian muncul karena didalam hutan terdapat berbagai kepentingan baik kepentingan pemerintah, sektor

privat maupun masyarakat. Mereka memiliki kepentingan yang beragam sehingga menimbulkan konflik antar mereka. Dengan demikian penegakan isu pada sumber daya pertanahan adalah bagaimana memberikan jaminan hak-hak masyarakat atas sumber daya pertanahan dan akses pengelolaan sumber daya hutan untuk mendukung penghidupan mereka.

## **2.2. Lemahnya dukungan kebijakan daerah dalam mempercepat implementasi CBFM.**

Seperti dikemukakan di depan, eskalasi konflik kebijakan antara pemerintah dan masyarakat mulai berlangsung tahun 1984/1985 bersamaan dengan penetapan tata batas hutan kesepakatan. Di samping penetapan tata batas hutan tidak partisipatif, kebijakan saat itu membatasi akses masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam proses selanjutnya, konflik pengelolaan sumber daya hutan juga berlangsung antara masyarakat dan pengusaha terkait dengan gugatan atas *corporate social responsibility* (CSR).

Menyadari akan terjadinya konflik dan keterbatasan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, pemerintah mulai memperkenalkan kebijakan social forestry atau lebih dikenal hutan kemasyarakatan. Pemerintah kemudian mengeluarkan paket-paket kebijakan tentang social forestry dari berupa Peraturan Pemerintah sampai SK Menteri. Beberapa Pemerintah Daerah juga berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah, seperti Lembata, Lombok Barat, Sumbawa, Lombok Timur. Namun, kebijakan-kebijakan itu belum didorong pada implementasi kebijakan. Belakangan Pemerintah mengeluarkan PP No. 6/2007 yang mengatur HKm, HTR dan hutan adat, namun masih banyak Pemerintah Daerah belum memiliki perangkat kebijakan di daerah yang jelas untuk mengimplementasikan PP No. 6/2007.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan kemudian menjadi kalimat kunci dari isu kehutanan dan kemiskinan di Nusa Tenggara. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan hutan. Konsep kebijakan negara di bidang kehutanan mengikuti logika bahwa negara menguasai seluruh kekayaan alam. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki hak untuk mengelola hutan. Persoalan yang terjadi adalah proteksi hutan oleh negara itu justru menimbulkan kerusakan hutan yang luar biasa. Di sisi lain, kebijakan itu menciptakan angka kemiskinan yang cukup tinggi karena masyarakat disekitar hutan tidak dapat menikmati kue sumber daya hutan dan hasil pembangunan hutan. Isu yang perlu dikemukakan terkait dengan kebijakan kehutanan adalah bagaimana kebijakan kehutanan memberi akses masyarakat di sekitar hutan memiliki akses dalam pengelolaan sumber daya hutan.

## **2.3. Kemiskinan**

Angka kemiskinan di kedua propinsi, NTT dan NTB cukup tinggi melampaui angka kemiskinan nasional (16,27 %). Jika menyimak tabel di bawah, kita bisa melihat penurunan angka kemiskinan berjalan cukup lamban. Pada 2005, angka kemiskinan NTB mencapai 24,94 %, namun

merangkak naik kembali pada angka 25,38 pada 2007. Sedangkan angka kemiskinan di NTT lebih tinggi, yaitu 27,58 % pada 2007. Di Sumba NTT misalnya, pendapatan penduduk di 16 desa miskin di TNLW rata-rata hanya Rp. 840.636,-/tahun. Paling tidak 40 % dari penduduk miskin itu tinggal di sekitar hutan. Sebagai contoh jumlah desa di kawasan Gunung Rinjani di Lombok sebanyak 84 desa dan 63 desa berada disekitar hutan dengan jumlah penduduk 450 ribu jiwa (PAR Rinjani, 2005).

**Tabel Jumlah Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 - 2005.**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin				
	2001	2002	2003	2004	2005
Kota Mataram	43.020	43.789	36.610	32.474	33.743
Lombok Barat	211.376	237.837	232.075	230.528	231.110
Lombok Tengah	171.115	235.348	215.489	212.286	216.655
Lombok Timur	386.155	310.471	278.513	274.128	269.585
Sumbawa Barat					21.864
Sumbawa	96.251	121.015	122.601	123.383	100.987
Dompu	56.193	56.348	52.126	52.220	52.550
Bima	211.389	141.002	98.764	90.850	91.433
Kota Bima			18.562	15.736	15.421
<b>NTB</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.145.810</b>	<b>1.054.739</b>	<b>1.031.605</b>	<b>1.033.348</b>
<b>Prosentase</b>	<b>30,43</b>	<b>29,16</b>	<b>26,21</b>	<b>25,26</b>	<b>24,94</b>

Sumber : BPS NTB, 2006

**Tabel Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2007**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase
2005	4.260.294	1.189.900	28,29
2006	4.338.100	1.208.200	27,74
2007	4.448.873	1.166.600	27,58

Sumber : Bappeda Propinsi NTT, 2007

Menurut data Potensi Desa, Badan Statistik Nasional (2003) membuat skor kemiskinan bagi desa di sekitar hutan, di antaranya fasilitas transportasi, listrik, kesehatan, pendidikan, pasar, kredit, dan telepon. BPS menyimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur di desa sekitar hutan lebih miskin ketimbang desa non hutan. Menurut penyediaan infrastruktur menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur di desa hutan mencapai 56,51 % dan luar desa hutan 54,23 %. Data ini juga ditegaskan oleh CESS (2005) bahwa kemiskinan masyarakat di sekitar hutan lebih parah ketimbang masyarakat luar. Dengan demikian mereka memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan publik.

Kondisi masyarakat sekitar hutan itu semestinya memperoleh prioritas dalam layanan publik. Namun, kondisi kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan belum menjadi fokus dalam menanggulangi kemiskinan. Semestinya, isu kemiskinan di sekitar hutan menjadi agenda dalam strategi penanggulangan kemiskinan, misalnya melalui mekanisme Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

#### 2.4. Kelembagaan

Paling tidak ada 4 hal yang mengemuka berkaitan dengan isu kelembagaan. **Pertama**, ketidak siapan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan. Ketidaksiapan kapasitas itu menyangkut perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan kontrol dalam mengelola hutan. Persoalan itu dipertajam dengan luhuhnya tatanan nilai masyarakat dalam menjaga, memelihara dan mengelola hutan. Hal ini berkaitan dengan pergeseran nilai masyarakat yang menjadikan sumber daya hutan sebagai nilai komoditi, ketimbang nilai konservasi.

**Kedua**, lemahnya kapasitas lembaga pemerintah dalam memfasilitasi dan menangani konflik. Kecenderungan yang terjadi adalah pemerintah membiarkan terjadinya konflik sumber daya hutan sehingga konflik-konflik semakin mengalami eskalasi dan meluas, sementara penanganannya masih terbatas.

**Ketiga**, minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Minimnya koordinasi ini bukan hanya terjadi antara lembaga pemerintah horisontal (sektor) namun juga vertikal (antara lembaga kabupaten dan propinsi). Otonomi daerah seharusnya dapat mempermudah mendorong koordinasi dan kerjasama antar lembaga sektoral dan lembaga vertikal, namun yang terjadi adalah ego sektoral. Kecenderungannya, justru kalangan NGO yang berinisiatif membangun koordinasi antar lembaga pemerintah.

Terakhir adalah bagaimana membangun keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, penanggulangan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim. Dalam rentang 3 tahun terakhir, beberapa kelembagaan multi-pihak dibangun untuk mensinergikan sumber daya dalam mengatasi ke tiga persoalan itu, seperti PAR Rinjani, Forum Multi Pihak Lombok Barat dan Sumbawa, Forum DAS, dll. Pekerjaan rumah ke depan adalah bagaimana memperkuat dan memperluas mekanisme kerja multi-pihak dalam pengelolaan hutan.

#### 2.5. Usaha ekonomi mikro dan kecil

Seperti dikemukakan di depan, jumlah penduduk miskin di NTB dan NTT masih cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin NTB mencapai 25 % lebih dan NTT 27 % lebih. Dari jumlah itu, paling tidak 50 % di antaranya tinggal di sekitar hutan dan tergantung penghidupannya pada sumber daya hutan. Mereka bukan saja miskin secara ekonomi, namun akses mereka untuk mendapatkan pelayanan publik juga terbatas. Dalam kasus di Sumba, rata-rata pendapatan penduduk yang tinggal di sekitar Taman Nasional hanya Rp. 840.636/tahun.

Nusa Tenggara merupakan daerah kepulauan kecil sehingga orientasi pengembangan ekonomi hasil hutan mesti diarahkan pada usaha – usaha ekonomi non kayu dan jasa lingkungan. Persoalannya adalah hasil hutan non kayu masih terbatas. Belum dipayungi oleh kebijakan yang memadai yang mengarah pada akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk kegiatan usaha ekonomi. Di sisi lain, sumber-sumber ekonomi di luar sektor hutan juga masih terbatas.

Dari berbagai isu di atas, Samanta akan mengusung 5 aspek dalam mengusung Progra Kemitran untuk Reformasi Kebijakan di Bidang Kehutanan, Penanggulangan Kemiskinan dan Perubahan Iklim di Nusa Tenggara. Ke 6 aspek itu di antaranya :

- a. Memperluas penyelenggaraan praktik HKm dan HTR;
- b. Pengembangan kebijakan CBFM;
- c. Pengelolaan hutan & mitigasi perubahan iklim;
- d. Mengembangkan *knowledge management* dan
- e. Membangun *micro, small dan medium enterprise* (MSME).
- f. *Fund raising*

## 10. Tantangan-tantangan

Stagnasi penyelenggaraan HKm selama ini salah satunya disebabkan kebijakan nasional yang sering berubah, sementara kebijakan yang dibuat belum diimplementasikan. Misalnya nasib PP No. 6/2007. Belum genap berusia 1 tahun sudah diamandemen dengan PP No. 3/2008. Situasi ini dikawatirkan akan semakin menimbulkan ketidak pastian pembangunan CBFM ke depan.

Tatangan berikutnya adalah bagaimana mengkoordinasikan dan mensinergikan antar tingkatan pemerintah dan lembaga-lembaga sektoral pemerintah yang saat ini masih kental dengan nuansa ego sektoral. Persoalan koordinasi itu bukan saja berlangsung pada tahap perencanaan, namun juga pelaksanaan program. Sementara salah satu isu utama di sektor kehutanan adalah kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Jika lembaga-lembaga pembuat kebijakan itu tidak saling bersinergi, maka pembaruan di sektor kehutanan, pengentasan kemiskinan dan pemanasan global akan tidak akan terwujud.

Persoalan lain dari kalangan lembaga sektoral pemerintah dan NGO adalah bagaimana memperkuat kapasitas dan pemahaman kepada mereka tentang persoalan sumber daya hutan, kemiskinan dan pemanasan global, analisa kebijakan, advokasi kebijakan dan penyelesaian konflik. Khusus bagi aparat

pembuat kebijakan, tantangannya adalah bagaimana mengembangkan kapasitas mereka dalam mengelola perencanaan program secara partisipatif. Selama ini proses penyusunan kebijakan masih menggunakan pendekatan prosedural, seperti Musbangdes sampai Rakorbang. Dengan demikian tantangan berikutnya adalah bagaimana memperkuat kapasitas mereka dalam perencanaan program yang lebih partisipatif dan terbuka.

Tantangan berikutnya di daerah adalah belum ada jaminan Pemda mengimplementasikan kebijakan nasional yang terkait dengan CBFM. Di samping itu, ada kecenderungan, inisiatif lembaga pemerintah dalam mendorong CBFM masih lemah dan ada kecenderungan mereka tergantung dengan inisiatif CSO, termasuk dalam penyediaan anggaran. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah adanya indikasi CBFM “dimanfaatkan” oleh kepentingan tertentu dan bukan untuk masyarakat miskin, terutama kasus HTR.

Tantangan terakhir adalah munculnya isu-isu mondial, seperti *climate change* (REDD) dan *timber legal assurance standard* (TLAS) atau standar legalisasi kayu. Bagaimana menarik kedua isu itu ke level local untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif CBFM ke dalam ke dua skema itu.

## 11. Proyek-proyek Sebelumnya dan Yang Relevan

Sejak 2005 Samanta mendapatkan dukungan dari DFID Multy stakeholders Forestry Program (MFP). Kemudian periode 2007-2008, Samanta bekerjasama dengan Partnership yang diarahkan pada isu sumber daya hutan, pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim. Dukungan itu berupa penguatan kapasitas, advokasi kebijakan, pengembangan informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, dana grant making dan fund raising. Selama ini Samanta bekerjasama dengan mitra local (LSM, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga kolaborasi) sebanyak 25 lembaga di Nusa Tenggara.

Proyek ini penting karena; **Pertama**, adanya keterkaitan kebutuhan untuk mempercepat implementasi PP No. 6/2007 dari level nasional sampai daerah terutama berkaitan dengan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan adat. Samanta memiliki kesamaan isu dengan yang diusung Partnership, yaitu pengelolaan sumber daya alam/hutan dan kemiskinan serta perubahan iklim. Hal ini berkaitan dengan tingkat kerusakan hutan dan angka kemiskinan di wilayah NTB dan NTT tergolong cukup tinggi.

**Kedua**, proyek ini merupakan *scaling up* proyek-proyek yang telah difasilitasi Samanta, DFID MFP dan Partnership sebelumnya. Cukup banyak inisiatif yang telah dilakukan dan dicapai dalam rangka memajukan kebijakan kehutanan. Meski cukup banyak hasil yang dicapai, namun proyek belum menjawab persoalan pengelolaan sumber daya alam dan kemiskinan secara utuh. Masih banyak kegiatan yang masih harus dilanjutkan, terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan CBFM.

Berikut beberapa inisiatif yang telah dibangun oleh para pihak di Nusa Tenggara yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan proyek Samanta, yaitu :

- Participatory Action Research (PAR) Rinjani (Tim Kolaborasi).
- Rekonstruksi tata batas partisipatif di TN Laiwanggi Wanggameti di Sumba Timur (Tim Kolaborasi)

- Penyusunan konsep pengembangan kawasan : gunung Rinjani, Mutis & TN Laiwanggi Wanggameti dan program HKM/HTR di Sumbawa
- Adanya rancangan KPH propinsi & zonasi KPH di NTB
- Penetapan area kerja HKM seluas 1.809,5 ha di Lombok Barat.
- SK Menhut HTR di Sumbawa (491 ha) dan Lombok Barat (1.400 ha).
- Penyusunan proposal pencadangan area HKM (1.200 ha) di 4 lokasi Lombok Barat dan 300 ha di desa sapit Lombok Timur
- Merancang konsep MSE di Bayan Lombok Barat
- Draf Perda BUMDes di Lombok Tengah
- Draf Perda HKM di Lombok Tengah
- Draf Perda HKM di Lembata.
- Perbub pedoman verifikasi usulan pencadangan area kerja HKM di Lobar.
- Rencana pengembangan HTCPE dengan pola HTR oleh tim kolaborasi (Dishut NTB, Konsepsi, Samanta, WWF dan Mitra Samya).
- Adanya lembaga multi pihak kehutanan, FKMM & Forum DAS di NTT & NTB.
- Inisiatif kelompok masyarakat rehabilitasi lahan/hutan rakyat paling tidak 500 ha di NTT & NTB.
- Draf Rencana Pengelolaan Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti di Sumba Timur (Balai Taman Nasional Sumba Barat)
- Draf strategi adaptasi dalam bidang lingkungan, ekonomi dan sosial terhadap pengaruh perubahan iklim (Bappedalda NTB).
- News letter & poster
- Booklet *grant making* Samanta
- *Web site* Samanta : [www.samantafoundation.org](http://www.samantafoundation.org)
- *Information and Communication Center on Nusa Tenggara* (ICCON) & mailing list [info\\_nusra@yahoo.com](mailto:info_nusra@yahoo.com)

## 12. Intervensi Strategi

### 5.1. Strategi-strategi untuk melaksanakan kegiatan

Untuk mengukung program pengelolaan sumber daya hutan, kemiskinan dan pemanasan global, SAMANTA akan mengembangkan kolaborasi melalui 3 strategi. **Pertama**, bagaimana membangun kolaborasi dan mensinergikan antar program para pihak yang selama ini telah dibangun. Program itu meliputi tiga hal pokok, yaitu : praktik dan inisiatif program yang sedang berlangsung, penguatan kapasitas, dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi. Praktik dan inisiatif program meliputi advokasi kebijakan, mediasi konflik sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Ada berbagai isu yang diusung dalam praktik dan inisiatif program di antaranya implementasi CBFM dalam PP No. 6/2007, hutan dan pemanasan global, kemiskinan, *knowledge management*, dan *micro, small and médium enterprise*. Sedangkan penguatan kapasitas meliputi kegiatan *share learning*, pelatihan, fasilitasi dan penerbitan buku. Sementara, pengembangan jaringan informasi dan komunikasi meliputi data base, kampanye, dan simpul jaringan.

**Kedua**, bagaimana membangun sharing dan mensinergikan berbagai sumber daya dan inisiatif program para pihak, terutama lembaga

pemerintah. Selama alokasi APBD untuk mendukung inisiatif CBFM masih sangat kecil. Bahkan di beberapa daerah, lembaga pemerintah tergantung pada pendanaan LSM. Padahal semestinya pemerintah bertanggung jawab menyediakan sumber dana.

**Ketiga**, Samanta mengembangkan peran *bridging* antara mitra dengan para stakeholder strategis utama di pembuat kebijakan, seperti BPKH, BP DAS, Dishut propinsi dan *WG for Pemberdayaan*.

Data dan informasi cukup penting dalam mendukung keberhasilan proyek, terutama dalam melakukan advokasi, namun persoalannya adalah data dan informasi baik yang disediakan Samanta maupun mitra belum digunakan secara optimal oleh para mitra. Upaya yang perlu dilakukan oleh Samanta dan mitra adalah sbb :

- Pelibatan para pihak melalui konsultasi untuk memberi masukan tentang substansi data dan informasi yang akan disediakan Samanta.
- Melakukan feed back dari para pihak tentang manfaat data dan informasi yang diberikan Samanta melalui angket.
- Melibatkan mitra maupun jaringan Samanta dalam mendistribusikan data dan informasi Samanta.
- Mendistribusikan data dan informasi kepada para pemangku utama baik terkait dengan konsep, data spatial, modul, dan sebagainya.
- Melakukan evaluasi dengan melibatkan *stakeholders* untuk mengetahui tingkat manfaat data dan informasi.

## 5.2. Relevansi strategi dengan tujuan dan keluaran program

Ada beberapa alasan strategi di atas perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan keluaran program, di antaranya :

- Kerja kolaborasi perlu dibangun mengingat para pihak memiliki kesamaan isu, seperti kemiskinan dan pengelolaan hutan. Namun, dalam implementasinya, program-program mereka tidak bersinergi sehingga menimbulkan *over lap* proyek dan ego sektoral, bahkan konflik. Sehingga program-program mereka kurang mencapai hasil yang diharapkan.
- Salah satu kendala dalam menyelenggarakan program CBFM, kemiskinan dan program perubahan iklim adalah terbatasnya pengetahuan dan kapasitas para pihak. Oleh karena itu, *knowledge management* perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas mereka.
- Salah satu problem mitra local adalah terbatasnya akses mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan lembaga perpanjangan di daerah untuk memberi dukungan kepada proyek mitra, seperti fasilitasi pemetaan, verifikasi, penetapan pencadangan area kerja HKm/HTR, pembiayaan, dll. Peran *bridging* cukup penting mengingat para mitra memiliki kesamaan keutuhan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

## **6. Para Mitra dan Pihak yang Mendapat Manfaat**

### **6.1. Mitra-mitra utama**

- Working Group for Peremberdayaan
- BPKH
- BP DAS
- Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten
- Yayasan Serbio Kabupaten Ngada
- Tim Kehutanan Multi Pihak Sumbawa
- Jaringan Madu Hutan Sumbawa
- Tim Multipihak Kehutanan Lombok Barat
- Konsepsi
- Transform
- Koslata
- SDM Kupang
- P2M Politani
- ICCON
- Samawa Center
- Komplas
- Gema Alam
- Yayasan Ayu Tani Flores Timur
- Jaringan Masyarakat Mutis Babnai Timor Tengah Selatan
- Lembaga Olah Hidup Sumbawa
- Yayasan Tana Nua Sumba Timur

### **6.2. Pihak-pihak yang mendapat manfaat utama dari proyek, di antaranya :**

- Sekurang-kurangnya 15 kelompok masyarakat (6.000 KK) akan mendapatkan manfaat langsung berkaitan dengan kepastian hak kelola atas hutan, penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi kebijakan dan akses sumber daya, program fisik, dan lain-lain.
- 20 mitra dari NGO, kelompok masyarakat dan lembaga multi pihak akan mendapatkan manfaat dari kegiatan penguatan kapasitas, pengembangan jaringan, dan akses dengan pembuat kebijakan.
- Paling tidak 15 lembaga pemerintah di tingkat lokal dan nasional akan mendapatkan manfaat dari tersedianya pendanaan pendamping dalam mengembangkan program kehutanan. Di samping itu, pemerintah juga mendapatkan pengalaman kerja kolaborasi dan proses perencanaan partisipatif.
- Lembaga donor mendapatkan manfaat memperoleh kemudahan akses distribusi sumber daya.
- Pengusaha dengan program CSRnya akan memperoleh manfaat dengan mendapatkan citra yang baik sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarnya.
- Lembaga filantropi & community foundation mendapatkan trust dari kalangan public, lembaga donor dan pengusaha di dalam memobilisasi sumber daya.

## 7. Analisa Resiko

### 7.1. Tingkat nasional

Dalam satu tahun terakhir, Pemerintah nasional cukup gencar didalam mengembangkan CBFM, yang dimulai dengan keluarnya PP No. 6/2007 dan launching HKM di Yogyakarta pada November 2007. Pemerintah juga telah mencanangkan 400 ha HKM pada 2009 dari 2,1 juta ha dan HTR seluas 5,4 juta ha. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Menteri Kehutanan beserta jajarannya di Jakarta. Jika ada perubahan kepemimpinan berlangsung pada Pemilu 2009, apakah Pemerintah pusat dapat menjamin kebijakan dan praktik CBFM di daerah masih sekuat saat ini. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga di Jakarta, seperti WG Pemberdayaan, WG Tenure, FKKM, dll, untuk melakukan advokasi kebijakan di level nasional.

### 7.2. Tingkat regional, propinsi dan kabupaten

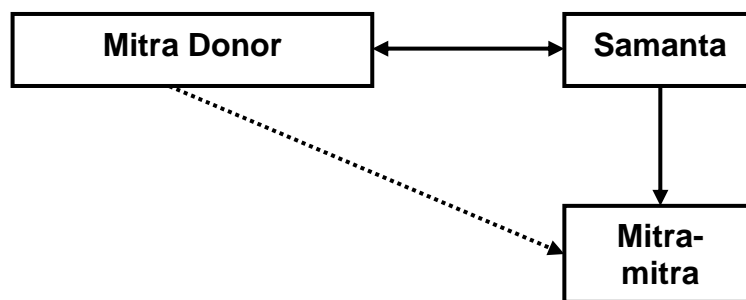
Ada beberapa hal yang berkaitan dengan analisa resiko di daerah. **Pertama**, dari hasil monitoring dan evaluasi, mutasi pegawai di daerah cukup mengganggu inisiatif CBFM di daerah. Beberapa staf lembaga Pemda terlibat dalam inisiatif CBFM mitra, namun ketika terjadi mutasi pegawai, pejabat baru tidak memahami inisiatif mitra. Antisipasinya adalah bagaimana menginternalisasikan proyek bukan pada person (pegawai), tetapi kelembagaan. **Kedua**, ketergantungan Pemda terhadap mitra sehingga proyek tidak berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi resiko adalah mendorong sharing anggaran dari Pemda. **Ketiga**, inisiatif CBFM memicu masyarakat di luar dampingan untuk perambahan hutan. Kasus ini pernah terjadi di HKM Batu Kliang Lombok Tengah dan Sesaot Lombok Barat. Oleh karena itu, mitra harus melakukan analisa social dan penguasaan data di tingkat lokal. **Keempat**, mitra *project oriented* sehingga tidak ada jaminan proyek tetap berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi resiko ini adalah membangun kemandirian lembaga masyarakat.

## II. PELAKSANAAN PROYEK

### 4. Kerangka Kerja Legal

Program *forestry governance program* (FGP) dan Multi-stakeholder Forestry Program (MFP) merupakan kerjasama antara Samanta Nusa Tenggara dan Partnership for Governance Reform (PGR) dan MFP-Yayasan Kehati Jakarta. Dalam hal ini PGR dan Yayasan Kehati bertindak sebagai mitra yang menyediakan sumber daya dana bagi Samanta. Sedangkan Samanta merupakan mitra di daerah yang memfasilitasi distribusi sumber daya dana kepada mitra lain di Nusa Tenggara berkaitan dengan program pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan kemiskinan dan mitigasi iklim.

Dengan demikian, Samanta diwakili Direktur akan melakukan MoU dengan pihak PGR dan Kehati dalam proses legalisasi kerjasama FGP dan MFP di Nusa Tenggara. Sementara dalam implementasi proyek FGP, Samanta akan melakukan MoU dengan para mitra di Nusa Tenggara. Hubungan kerangka kerja legal terstruktur dalam bagan berikut.



### 5. Deskripsi Kegiatan

#### 2.1. Goal

Pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan kelestarian hutan di Nusa Tenggara.

#### 2.2. Indikator Keberhasilan Goal

- Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin disekitar hutan.
- Bertambahnya lapangan kerja bagi masyarakat disekitar hutan
- Meningkatnya daya dukung lingkungan dan sumber daya hutan

#### 2.3. Out Come

Reformasi kebijakan CBFM yang memberi akses masyarakat miskin di sekitar hutan dalam mengelola hutan dan memberi kontribusi terhadap pengurangan gas karbon.

#### 2.4. Out Put

- Adanya 20 inisiatif mitra dalam mendorong kepastian hukum pengakuan hak masyarakat miskin di sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan.

- Samanta dan mitra memiliki kapasitas dalam mengembangkan program CBFM dan penggalangan sumber daya
- CBO memiliki kapasitas untuk mengelola kelembagaan, kegiatan usaha MSE dan bekerjasama dengan pihak lain

## 2.5. Kegiatan

- Pengembangan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- Pengorganisasian & pendampingan kelompok masyarakat pengelola HKm dan HTR
- Melakukan pemetaan dan menyusun rencana pengelolaan HKm & HTR
- Penyusunan proposal usulan penetapan area kerja HKm ke Menhut.
- Loby pembuat kebijakan di pemerintah daerah dan nasional dalam rangka mendorong percepatan implementasi HKm dan HTR.
- Memfasilitasi para pihak terkait dalam mengembangkan kerja-kerja kolaborasi dalam mendorong percepatan implementasi HKm dan HTR
- *Legal drafting* pedoman verifikasi daerah penetapan area kerja HKm
- Fasilitasi masyarakat dalam mendapatkan ijin pengelolaan HKm dan HTR
- Loby proses perijinan dan pencadangan area kerja HKm baik di Pemda maupun di Pemerintah pusat
- Mendorong Pemda melakukan pencadangan area kerja HKm dan HTR.
- Diskusi/lokakarya tematik CBFM dan perubahan iklim
- Perluasan dan penguatan kapasitas kelompok pengelola hutan rakyat
- Penyediaan paket-paket informasi berkaitan dengan HKm/HTR, Sistem Verifikasi Sahnya Kayu (SVSK) dan Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD)
- *Share learning* pembejalaran CBFM
- Pengembangan proposal program pengelolaan SDA
- Penyusunan konsep dan workplan yang implementatif serta menyediakan media penggalangan dana
- Menyiapkan site-site calon penerima dana dari fund raising
- Penggalangan dana dari individu, korporasi dan lembaga donor.
- Identifikasi penyedia sumber daya baik individu maupun swasta
- Pembentukan dan menyiapkan mekanisme kelembagaan dan jaringan CBO dan *micro and small enterprise* (MSE)
- Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola CBO & MSE.
- Menyiapkan kerangka kerjasama yang adil dan transparan antara CBO dengan pengusaha, lembaga keuangan dan pihak lain.
- Monev, review program & asistensi mitra
- DII

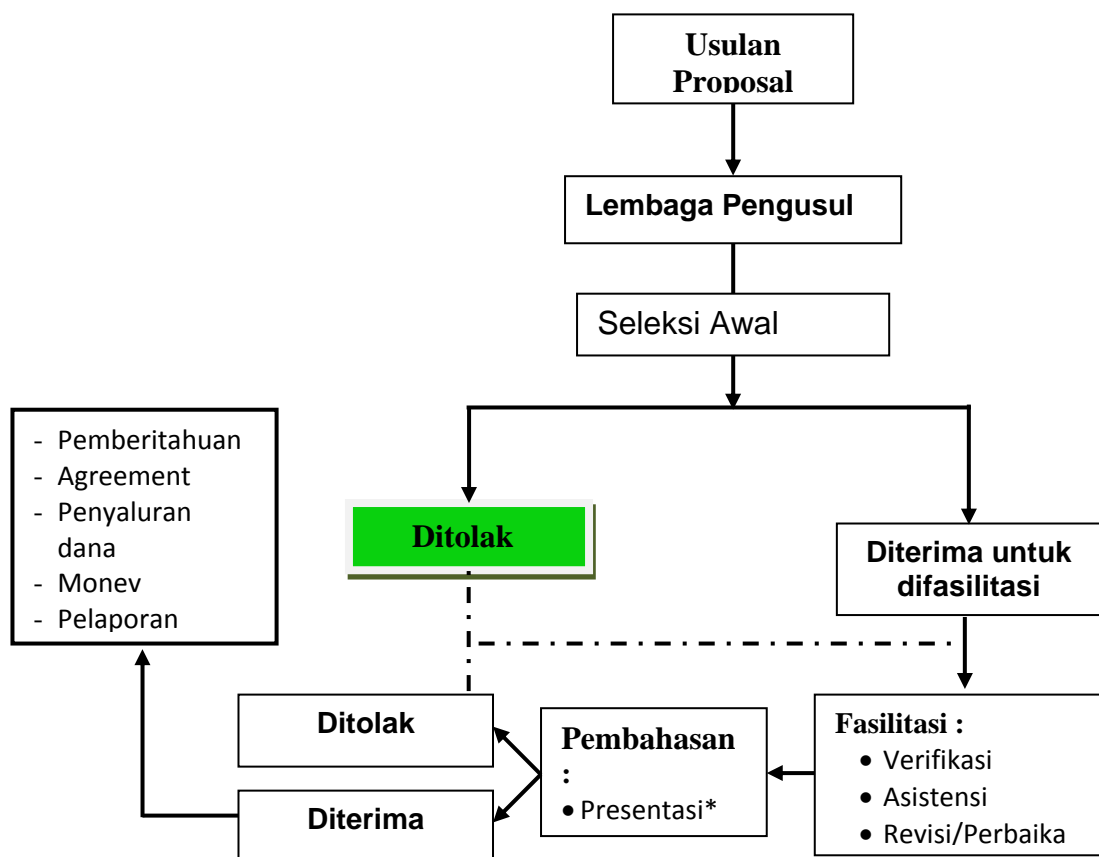
## 6. Pengaturan Pelaksanaan Proyek

### 3.1. Pengelolaan pelaksanaan proyek

Program Program Tata Kelola Kehutanan, Kemiskinan & Perubahan Iklim (*Forestry Governance, Poverty & Climate Change Program*) di Nusa Tenggara merupakan kerjasama antara Samanta Nusa Tenggara dan mitranya, PGR dan MFP-Kehati. Dalam hal ini para mitra bertindak sebagai mitra yang menyediakan sumber daya dana bagi Samanta. Sedangkan Samanta merupakan mitra di daerah yang mengelola sumber daya dana mitranya.

Sumber daya yang dikelola Samanta kemudian dihibahkan kepada para mitra local baik dari unsure lembaga pemerintah, LSM, kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga kolaborasi. Dana hibah ini dikelola dengan mekanisme seleksi proposal yang bagan alirnya disajikan sbb :

#### Bagan Fasilitasi Dana Hibah



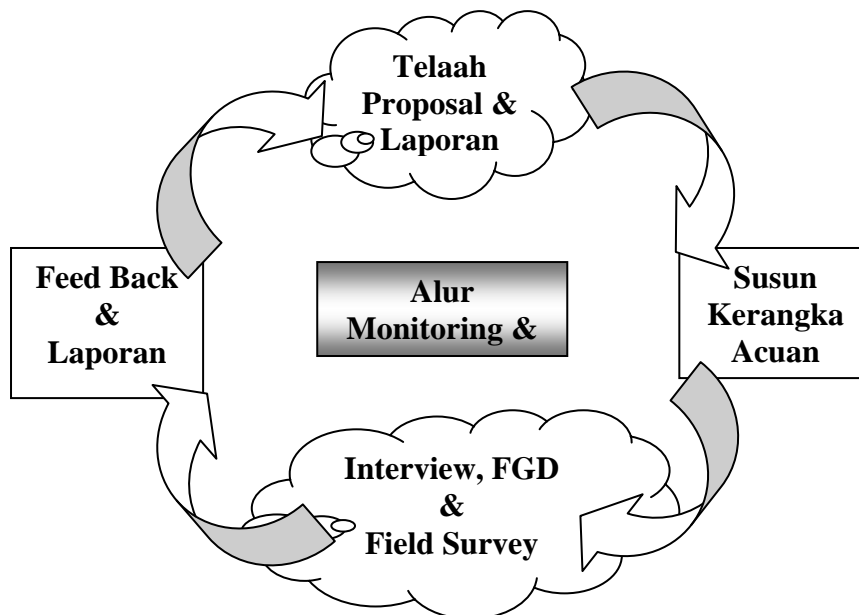
Samanta mengelola dana tersebut melalui dua pintu. **Pertama**, dana akan dikelola untuk fasilitasi dana hibah kepada mitra (LSM, kelompok masyarakat dan lembaga kolaborasi) di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Skema fasilitasi dana hibah ini diperuntukkan bagi program mitra terkait pengembangan CBFM, pengurangan kemiskinan dan pengurangan emisi melalui skema *call for proposal*. Sementara dalam implementasi fasilitasi dana hibah, Samanta akan melakukan

Kontrak Kerjasama dengan para mitra di Nusa Tenggara. Proses fasilitasi dana hibah kepada mitra disajikan pada bagan di atas. Daftar mitra yang memperoleh dana hibah disajikan pada lampiran.

**Kedua**, dana dikelola secara langsung oleh Samanta diperuntukkan bagi penguatan kapasitas mitra, knowledge management, *fund raising* dan institusional building. Penguatan kapasitas dilakukan baik bagi mitra maupun internal Samanta

### 3.2. Monitoring dan evaluasi;

Monev dilakukan setiap bulan sekali dengan melakukan kunjungan ke kantor mitra dan, jika diperlukan, melakukan kunjungan lapangan. Adapun alur di dalam melakukan monitoring dan asistensi proyek mitra adalah sebagai berikut :



Adapun tahapan dan metode monitoring dan wawancara yaitu sbb :

- a. Sebelum melakukan monitoring, SAMANTA melakukan review terhadap laporan-laporan mitra untuk menyiapkan materi monitoring. Di samping itu, referensi yang akan digunakan dalam melakukan monitoring adalah proposal proyek mitra. Metode yang digunakan adalah telaah dokumen laporan kemajuan proyek dan proposal para mitra.
- b. Mengembangkan kerangka acuan monitoring dan asistensi.
- c. Monitoring dilakukan dengan mengunjungi lembaga mitra untuk melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam proyek pada setiap lembaga mitra. Metode yang digunakan adalah interview dan FGD dengan masing-masing staff (administrasi & lapangan) dan penanggung jawab proyek.
- d. Kunjungan lapangan di lokasi proyek. Metode yang digunakan dengan melakukan survey lapangan dan wawancara dengan para pihak yang dilayani oleh mitra di lokasi proyek. Karena monitoring ini merupakan

tahap awal, maka kegiatannya belum diarahkan pada kunjungan lapangan.

- e. Memberikan umpan balik kepada mitra. Umpan balik dilakukan baik secara lisan pada saat bertatap muka dengan mitra maupun melalui laporan monitoring.
- f. Penyusunan pelaporan monev
- g. Diskusi hasil monev didiskusikan dengan pimpinan Samanta dan staff. Hasil yang diharapkan dari diskusi adalah teridentifikasinya kendala dan hambatan serta capaian proyek dan menyusun rekomendasi.

### III. LOKASI

Lokasi proyek di Nusa Tenggara, yaitu di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Secara lebih khusus lokasi proyek berada di 9 kabupaten/kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Ngada, Flores Timur, Kupang, Sumba Timur dan TTS.

### IV. ANGGARAN

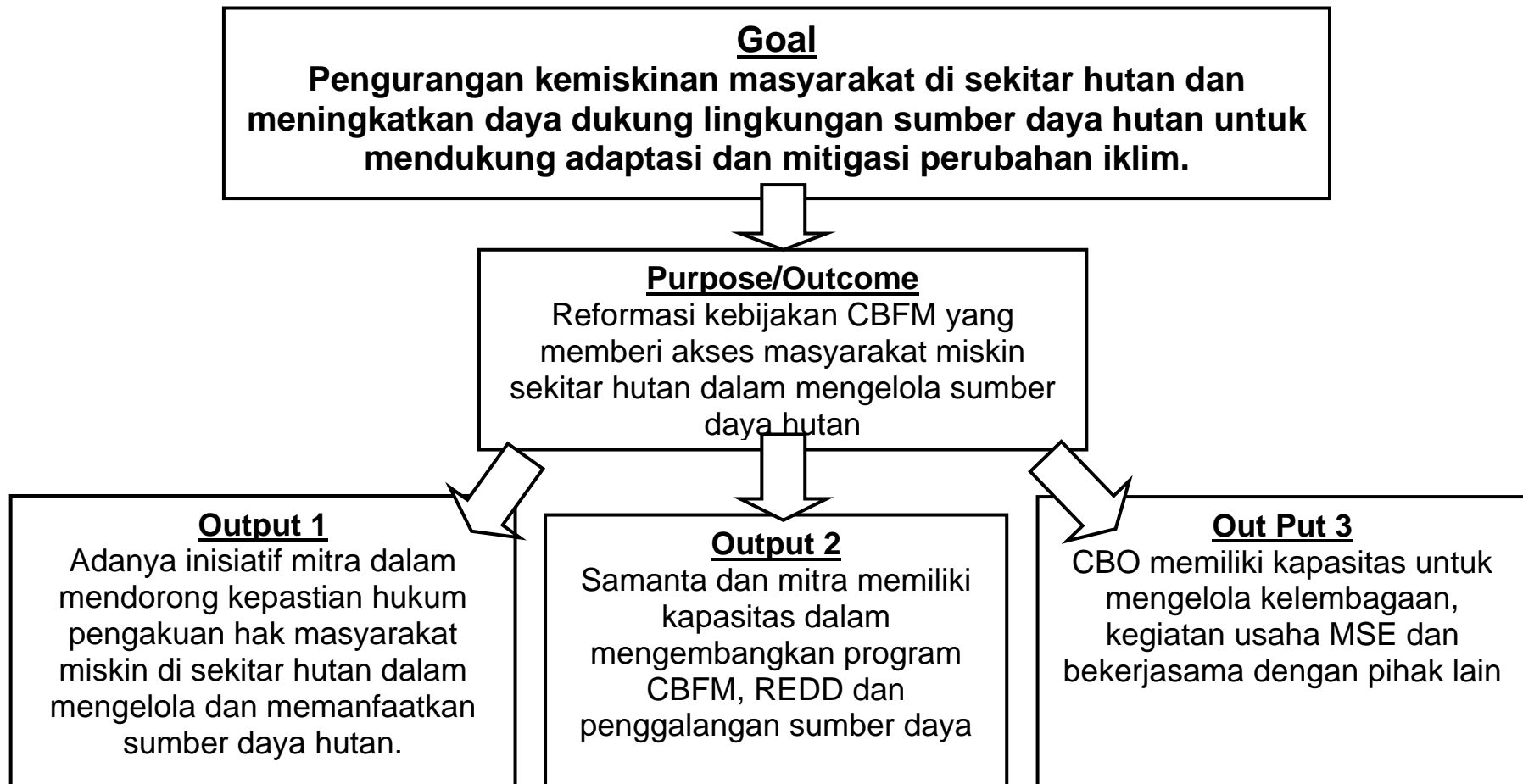
Anggaran untuk mendukung program “**Program Tata Kelola Kehutanan, Kemiskinan & Perubahan Iklim (*Forestry Governance, Poverty & Climate Change Program*) di Nusa Tenggara**” sebesar **Rp. 2.685.890.000,-**. Berasal dari **PGR Rp. 1.785.000.000,-** dan **MFP-Kehati Rp. 899.800.000,-**. Anggaran tersebut belum termasuk swadaya para 18 mitra Samanta yang terlibat dalam program ini.

### IV. WAKTU

Waktu pelaksanaan program adalah 13 bulan, dan dimulai pada **1 Oktober 2008** serta berakhir pada **1 Oktober 2009**.

Lampiran 1 :

**Kerangka Kerja Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta)  
Program Tata Kelola Kehutanan, Kemiskinan & Perubahan Iklim  
(Forestry Governance, Poverty & Climate Change Program) Di Nusa Tenggara**



Lampiran 2 :

**Kerangka Kerja**  
**“Program Tata Kelola Kehutanan, Kemiskinan & Perubahan Iklim**  
**(Forestry Governance, Poverty & Climate Change Program) di Nusa Tenggara”**  
**Periode 2008 - 2009**

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
<p><b>Goal</b>                      Pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan kelestarian hutan untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin disekitar hutan.</li> <li>• Bertambahnya lapangan kerja bagi masyarakat disekitar hutan</li> <li>• Meningkatnya daya dukung lingkungan dan sumber daya hutan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja</li> <li>• Laporan monitoring</li> <li>• Dokumentasi foto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pemda konsisten dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah &amp; nasional</li> <li>• Kebijakan pembangunan kehutanan konsisten dengan kebijakan tata ruang daerah dan nasional.</li> </ul>
<p><b>Out Come</b>                      Reformasi kebijakan CBFM yang memberi akses masyarakat miskin di sekitar hutan dalam mengelola hutan dan memberi kontribusi terhadap pengurangan gas karbon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya kebijakan kehutanan di daerah yang <i>pro poor</i> dan memberi kontribusi pada pengurangan karbon di 6 kabupaten.</li> <li>• Meningkatnya dukungan politik dan anggaran dari eksekutif dan legislative dalam CBFM di 6 kabupeten</li> <li>• Semakin bertambahnya pelibatan para pihak dalam CBFM, penguatan ekonomi masyarakat, dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen produk kebijakan lokal</li> <li>• Laporan interview dengan para pihak</li> <li>• Budget analisis</li> <li>• Interview</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan daerah konsisten dengan kebijakan nasional</li> <li>• Kebijakan pemerintah pusat tidak berubah-ubah</li> <li>• Komitmen legislative &amp; eksekutif pada kebijakan anggaran <i>pro</i></li> </ul>

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
			report	<p><i>poor.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek para <i>stakeholders</i> saling mendukung CBFM, peningkatan ekonomi masyarakat dan adaptasi &amp; mitigasi perubahan iklim.</li> </ul>
<p><b>Output 1</b>  <b>Adanya inisiatif mitra dalam mendorong kepastian hukum pengakuan hak masyarakat miskin di sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya 20 mitra LSM, kelompok masyarakat dan lembaga kolaborasi di 9 kabupaten/kota memiliki inisiatif mengembangkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, penguatan ekonomi dan rehabilitasi lahan</li> <li>• Adanya usulan Peraturan Bupati, perijinan IUPHKm/HTR dan penetapan area kerja HKm oleh Menhut di 6 kabupaten daerah yang mendukung CBFM.</li> <li>• Bertambahnya luas penetapan area kerja dan perijinan HKm/HTR di 8 kabupaten seluas 5.200 ha.</li> <li>• Adanya 39 kelompok masyarakat pengelola HKm dan HTR semakin meluas di 6 kabupaten yang beranggotakan 6.000 orang.</li> <li>• Adanya 10 kelompok pengelola hutan rakyat seluas 300 ha</li> </ul>	Agustus 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen usulan pencadangan area kerja HKm/HTR kepada Menhut dan usulan IUPHKm/HTR dari Bupati</li> <li>• Peta lokasi pencadangan area kerja HKm dan HTR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah daerah dan pusat konsisten dengan kebijakan HKm</li> <li>• Tidak terjadi mutasi pejabat pada stakeholder utama saat berlangsungnya proyek</li> </ul>
<p><b>Kegiatan-kegiatan output 1 :</b>  1.1. Mengidentifikasi dan melakukan pemetaan lokasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teridentifikasinya paling tidak 8 site baru CBFM, terutama HKm dan HTR.</li> <li>b. Paling tidak terdapat rekomendasi Bupati</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar pengurus dan anggota kelompok</li> </ul>	Pembuat kebijakan konsisten dengan kebijakan PSDHBM, seperti HKm, HTR, hutan

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
<p>calon area kerja HKm</p> <p>1.2. Pendampingan dan pembentukan kelompok calon pengelola HKm</p> <p>1.3. Menyusun rencana kerja pengelolaan HKm</p> <p>1.4. Mendukung loby &amp; kegiatan advokasi kebijakan di daerah dan Dephut</p> <p>1.5. Memfasilitasi lembaga pemerintah terkait dalam mengembangkan kebijakan di daerah (Perda, Perbub, dll)</p> <p>1.6. Drafting pedoman verifikasi daerah penetapan area kerja HKm</p>	<p>terhadap 8 usulan area kerja HKm dan 1 area kerja HTR yang telah mendapat penetapan Menhut minimal seluas 3.000 ha di 8 kabupaten</p> <p>c. Paling tidak terdapat 10 kelompok masyarakat beranggotakan 4.000 orang di pinggiran hutan yang siap mengelola HKm dan HTR di 6 kabupaten.</p> <p>d. Adanya usulan Peraturan Bupati tentang pedoman verifikasi pencadangan area kerja HKm minimal di 3 kabupaten.</p> <p>e. Tersusunnya 1 draf SK Bupati Lombok Barat tentang pedoman verifikasi usulan HKm</p> <p>f. Paling tidak terbentuk 2 pokja HKm yang beranggotakan para pihak di 2 kabupaten yang berperan mendorong percepatan HKm</p>	<p>1 draf regulasi tersusun pada Mei 2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen proposal usulan pencadangan area kerja HKm/HTR</li> <li>• Peta pencadangan area kerja</li> <li>• Draft Perbub</li> <li>• Draft SK Bupati</li> </ul>	<p>desa dll</p>
<p>1.7. Pertemuan konsolidasi kelompok di</p>	<p>a. Paling tidak terdapat 5 kelompok pengelola ijin HKm dan HTR yang beranggotakan 2.000 orang di 3 kabupaten.</p>	<p>1 usulan ijin HKm pada September</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen proposal IUPHKm/HTR</li> </ul>	<p>Adanya share pendanaan dari Pemda dalam mendukung proses</p>

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
lokasi yang sudah mendapatkan penetapan pencadangan area kerja HKm 1.8. Melakukan pemetaan dan menyusun rencana pengelolaan HKm 1.9. Pengajuan ijin HKm 1.10. Loby proses perijinan dan pencadangan area kerja HKm baik di Pemda maupun di Pemerintah pusat	b. Tersusunnya rencana kelola pada calon lokasi IUPHKm/IUPHTR seluas 2.200 ha oleh kelompok masyarakat di 3 kabupaten. c. Adanya 3 peta digitasi di calon lokasi IUPHKm dan IUPHTR di 3 kabupaten. d. Adanya usulan IUPHKm minimal 2.000 ha di 2 kabupaten dari kelompok kepada masyarakat Bupati e. Adanya usulan IUPHTR minimal 200 ha di 1 kabupaten dari kelompok masyarakat kepada Bupati	2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta digital calon lokasi IUPHKm/HTR</li> </ul>	legalisasi
1.11. Perluasan dan penguatan kapasitas kelompok pengelola hutan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya penambahan paling tidak 3 kelompok baru beranggotakan 50 orang dari 7 kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat yang beranggotakan 300 orang</li> <li>Terdapat penambahan luas penanaman hutan pada hutan rakyat yang semula 221 ha menjadi paling tidak 300 ha</li> </ul>	Di 7 desa sampai September 2009	Survey lapangan Dokumentasi foto	Tidak terjadi musim kemarau yang berkepanjangan
1.12. Fasilitasi penyusunan rancang bangun KPH model	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Stakeholders</i> teridentifikasi yang akan menjadi <i>task force</i> yang berperan memfasilitasi penyusunan rancang bangun KPH</li> <li>Terpilihnya site model KPH</li> </ul>	Juni 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta KPH model</li> <li>Laporan konsep</li> </ul>	Kebijakan nasional tidak berubah-ubah

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
Rinjani Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya 1 kali study banding ke Yogyakarta</li> <li>• Hasil review pengembangan organisasi KPH tersusun</li> <li>• Draft rancang bangun bentuk organisasi KPH, sruktur pengelola dan tata hubungan kerja diusulkan ke Pemda</li> <li>• Tersusunnya dokumen pembelajaran dan best practices pengembangan KPH model</li> </ul>		rancang bangun KPH <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	
1.13. Fasilitasi penyusunan strategi implementasi Sistem Verifikasi Sahnya Kayu di Lombok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya pelatihan TLAS</li> <li>• Terselenggaranya kegiatan sosialisasi TLAS di 3 kabupaten</li> <li>• Tersusunnya strategi implementasi TLAS di daerah</li> </ul>	Mei 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar hadir</li> <li>• Laporan strategi implementasi SVSK</li> </ul>	
<b>Output 2</b> <b>Samanta dan mitra memiliki kapasitas dalam mengembangkan program CBFM, REDD dan penggalangan sumber daya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kapasitas Samanta dalam tata kelola keuangan, fund raising, <i>knowledge management</i>, dan management lembaga <i>grant making</i>.</li> <li>• Paling tidak kapasitas 8 mitra dalam melakukan advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat meningkat</li> <li>• Paling tidak ada 2 media informasi berupa news letter 5.000 lb dalam 1 tahun dan web site sebagai media <i>share learning</i>.</li> <li>• Paling tidak kapasitas 8 mitra dalam pengelolaan keuangan, management proyek &amp; monev</li> </ul>	Sampai September 2009	Laporan evaluasi & review proyek	
<b>Kegiatan out put 2 :</b> 2.1. Memfasilitasi kerja kolaborasi, pertemuan	Adanya 5 pertemuan para pihak dalam mendukung percepatan implementasi CBFM, tata kelola hutan yang baik, penyelesaian konflik, dan upaya-upaya adaptasi dan	5 kali sampai September	Notulen pertemuan & Laporan interview	

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
mediasi dan pengawalan implementasi CBFM	mitigasi perubahan iklim.	2009		
2.2. Asistensi staf Samanta dan mitra dalam pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 13 mitra mampu menyusun laporan sesuai standard pelaporan keuangan FGP.</li> <li>Adanya 3 paket informasi tentang pengelolaan keuangan yang diberikan kepada 13 mitra</li> </ul>	4 kali pertemuan/diskusi sampai September 2009	Tor & jadwal pertemuan	
2.3. <i>Share learning</i> pembejalaran CBFM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdistribusikannya data/informasi melalui web site dan mailing list paling tidak kepada 25 <i>stakeholders</i>, seperti LSM, lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, dll.</li> <li>Up dated data web site minimal 3 bulan sekali</li> <li>Diterbitkannya news letter sebanyak 1.000 lb setiap 2 bulan</li> <li>Tersedianya minimal 3 jenis data/informasi, yaitu kehutanan, kemiskinan dan perubahan iklim dalam bentuk <i>electronic data</i> di kawasan Rinjani dan Mutis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 bulan sekali &amp; 1 kali pada September 2009</li> <li>Sampai September 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leaflet &amp; news letter</li> <li>Up dated web site</li> <li>Data base</li> </ul>	Kesediaan mitra untuk saling berbagi informasi dan data
2.4. Asesmen pengembangan program pengelolaan SDA 2.5. Penyusunan proposal pengembangan program pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya laporan peta permasalahan, potensi dan kebutuhan pengembangan program SDA dan kemiskinan</li> <li>Adanya 2 proposal pengembangan program pengelolaan sumber daya alam bagi pengurangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan</li> </ol>	1 kali sampai Maret 2009	Dokumen proposal	

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
SDA				
2.6. Penyusunan konsep dan workplan yang implementatif penggalangan dana 2.7. Menyediakan media penggalangan dana 2.8. Identifikasi sumber pendanaan baik individu maupun swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya konsep dan workplan penggalangan dana yang bersumber dari local, nasional dan internasional baik dari individu maupun korporasi</li> <li>• Tersedianya media penggalangan dana berupa leaflet sebanyak 1.000 lb</li> <li>• Adanya 2 iklan Samanta di Koran local di NTB dan NTT</li> <li>• Tersusunnya paling tidak 25 profil penyedia sumber daya potensial baik individu maupun korporasi di local dan nasional.</li> <li>• Paling tidak tersedia Rp. 5 juta/tahun dari public dan swasta</li> </ul>	1 kali sampai Maret 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen konsep dan workplan</li> <li>• Brosur</li> <li>• Resource list</li> <li>• Iklan Koran</li> </ul>	
2.8. Monev, review program & asistensi mitra 2.9. Pertemuan regular staff, pengurus, Pembina & Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya kegiatan monev dan asistensi proyek mitra.</li> <li>• Terselenggarakannya pertemuan Badan Pelaksana, Pengurus, Pembina &amp; Pengawas.</li> </ul>	1 dan 3 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Laporan 3 bulanan</li> <li>• <i>Organizational capacity aseessment</i></li> </ul>	
<b>Out Put 3 : CBO memiliki kapasitas untuk mengelola kelembagaan,</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya unit-unit usaha ekonomi rakyat di sekitar yang siap menjalankan kegiatan usaha</li> <li>• Terbentuknya jaringan MSE petani madu hutan di sekitar hutan.</li> </ul>	Agustus 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran dasar</li> <li>• Kontrak kerja</li> </ul>	Pemda konsisten dengan kebijakan dan program kemiskinan

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
<b>kegiatan usaha MSE dan bekerjasama dengan pihak lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama pemasaran produk hasil hutan bukan kayu antara kelompok MSE dengan pengusaha</li> </ul>			
<u>Kegiatan Out Put 3 :</u> 2.1. Pembentukan dan menyiapkan mekanisme kelembagaan dan jaringan CBO 2.2. Study potensi & produk usaha ekonomi masyarakat pingiran hutan 2.3. Asesment & dokumentasi produk usaha masyarakat 2.4. Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola CBO 2.5. Menyiapkan kerangka kerjasama yang adil dan transparan antara CBO dan pengusaha. 2.6. Mendorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya minimal 10 unit usaha ekonomi hasil hutan, seperti kopi, kakao, vanili, kemiri, buah-buahan, dll yang berbasis pada HKM</li> <li>• Adanya penambahan anggota jaringan madu hutan dari 60 orang menjadi 100 orang.</li> <li>• Tersedianya laporan kajian potensi hasil hutan bukan kayu, seperti kopi, kakao, vanili, kemiri, buah-buahan, dll di 4 kabupaten.</li> <li>• Adanya 2 kontrak kerjasama kemitraan antara CBO dengan pengusaha dalam usaha produk hutan bukan kayu di 2 kabupaten.</li> <li>• Tiga kali pelatihan management organisasi, tata kelola usaha dan pengelolaan keuangan bagi kelompok sekitar hutan terselenggara</li> <li>• Data potensi SDH non kayu madu hutan di kawasan hutan Lombok Utara, Sumbawa dan Mutis tersedia</li> <li>• Sebanyak 2.000 media pemasaran madu hutan di kawasan Mutis tersedia</li> <li>• Jaringan kelompok usaha madu hutan dari 6 koperasi beranggotakan 69 orang di kawasan Mutis TTS terbentuk</li> <li>• Jaringan kelompok usaha dari 2 koperasi beranggotakan 75 orang sekitar hutan di Lombok Utara terbentuk</li> <li>• Profil Kelompok-kelompok usaha produk SDH non</li> </ul>	1 jaringan petani madu sampai September 2009  1 krjasama usaha pada September 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar anggota</li> <li>• Laporan</li> <li>• Aturan kelompok</li> <li>• Perjanjian Kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari Pemerintah sebagai fasilitator</li> </ul>

Goal/Tujuan/Out Put/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Targets	Alat Verifikasi	Asumsi
kontrak kerjasama antara CBO dengan pengusaha	kayu tersusun di Lombok <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil calon-calon mitra usaha (termasuk lembaga keuangan) kemitraan tersusun</li> </ul>			
2.7. Pembentukan pusat informasi sumber daya hutan dan pemasaran di Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola pusat informasi produk sumber daya hutan non kayu dan pemasaran terbentuk</li> <li>• Terselenggaranya identifikasi potensi SDH non kayu dan pasar di Sumbawa</li> <li>• Terselenggaranya lokakarya pengembangan pusat informasi dan pasar SDH non kayu di Sumbawa</li> <li>• Pengurus pusat informasi di Kabupaten Sumbawa terbentuk</li> <li>• Data potensi SDH non kayu dan pasar di Sumbawa tersedia</li> <li>• Tersedianya <i>web site</i> sumber daya hutan dan pemasaran di Sumbawa</li> </ul>	Mei 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan riset</li> <li>• Blog site</li> <li>• Daftar produk SDh non kayu</li> </ul>	

Lampiran 4 :

Daftar Mitra Samanta yang Memperoleh Dana Hibah di Nusa Tenggara Periode 2008 – 2009

No	Bidang	Mitra	Lokasi	Nama Proyek	Anggaran <sup>1</sup>
1	<b>Hutan Kemasyarakatan (HKm)</b>				
		Konsepsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santong KLU</li> <li>• Salud KLU</li> <li>• Munder KLU</li> <li>• Sesaot Lobar</li> </ul>	Kemitraan Bagi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Perluasan Akses Kelola Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Pulau Lombok	Rp. 223.865.000,-
		Koslata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenggala/Bentek KLU</li> </ul>	Pemberdayaan masyarakat adat Bantek dan Jenggala dalam mengakses ijin kelola HKm	Rp. 187.492.500,-
		Gema Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapit Lotim</li> <li>• Sambelia Lotim</li> </ul>	Pengajuan Pencadangan Area Kerja Hutan Kemasyarakatan di Lombok Timur	Rp. 62.500.000,-
		Transform	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batu Kliang Utara Loteng</li> </ul>	Fasilitasi Tata Kelola Kelembagaan dan Perizinan Pemanfaatan HKm di Kabupaten Lombok Tengah	Rp. 133.100.000,-
		SDM Kupang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Koa dan Salbait TTS</li> </ul>	Mendorong pengelolaan HKm berbasis Suf secara kolaboratif di Kawasan Hutan Produksi Kaniti, Kabupaten TTS	Rp. 218.905.000,-
		Serbio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolobobo, Ngada</li> </ul>	Mendorong pengembangan HKm di Wolobobo Ngada dan di kawasan hutan lindung Kaniti, TTS	Rp. 150.060.000,-
		YTNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapohak Penang, Sumba Timur</li> </ul>	Memfasilitasi Proses Penetapan Area Kerja HKM di Kawasan Hutan Kapohak Penang, Kecamatan Kahaungu Eti , Kabupaten Sumba Timur	Rp. 184.840.000,-

<sup>1</sup> Anggaran berasal dari Samanta dan swadaya mitra

		Ayu Tani	• Mutis-Babnai Fatumnasi TTS	Fasilitasi Pencadangan Area Kerja Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kawasan Wuk0h Lew0l0r0h, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.	Rp. 97.275.000,-
		TP2KMP Sumbawa	• Sebedo, Sumbawa	Asistensi pelaksanaan HKm di kabupaten Sumbawa	Rp. 105.310.000,-
		TMK Lobar	• Sekotong Lobar	Pengawasan implementasi pelaksanaan verifikasi penetapan areal kerja HKm di Lobar	Rp. 40.000.000,-
		P2M Politani Kupang	• NTT	Memfasilitasi Percepatan Implementasi Hkm/Htr di NTT	Rp. 110.800.000,-
<b>2</b>	<b>Hutan Tanaman Rakyat (HTR)</b>				
		Samawa Center	Uma Dene Sumbawa	Program Penguatan Kapasitas Parapihak Untuk Menindaklanjuti Implementasi Htr Di Kab. Sumbawa	Rp. 188.825.000,-
<b>3</b>	<b>Usaha Mikro &amp; Kecil (Micro &amp; Small Enterprise)</b>				
	a. Madu	JMHS	Batu Dulang Sumbawa	Penguatan Kelembagaan Jaringan dalam Rangka Perluasan Pemasaran Madu Hutan Sumbawa	Rp. 50.000.000,-
	b. Madu	Jaringan Masyarakat Mutis-Babnai	Mutis-Babnai Fatumnasi TTS	Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian kawasan hutan (SUF) demi pengembangan HKm melalui pengelolaan madu alam Gunung Mutis	Rp. 60.005.000,-
	c. HHBK	Konsepsi	• Santong KLU • Ganggalang & sekitarnya KLU • Sesaot Lobar • Sambelia Lotim	Pengembangan Kelembagaan Kemitraan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan non-kayu oleh Beberapa Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Rp. 159.600.000,-
	d. Informasi hasil hutan non kayu & pemasaran	Lembaga Olah Hidup	Sumbawa	Pengembangan Pusat Informasi Data Base Komoditi dan Pemasaran Hasil Hutan di Kawasan Puncak Ngengas Sumbawa	Rp. 55.840.000,-

4	<b>Sistem Verifikasi Sahnya Kayu (SVSK)</b>	Koslata	• Pulau Lombok	Menuju Pelembagaan Sistem Jaminan Legalitas Kayu di Lombok, NTB	Rp. 114.800.000,-
5	<b>Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</b>	FKKM NTB	• Rinjani Barat Lombok	Fasilitasi Pembentukan Organisasi Pengelola KPH Model di Rinjani Barat.	Rp. 157.160.000,-
6	<b>Jaringan infokom</b>	ICCON	NTT	Pengelolaan Informasi dan Data Base SDA/Hutan di NTT melalui Pengembangan Pusat Informasi dan Komunikasi Nusa Tenggara/ICCON ( <i>Information and Communication Centre on Nusa Tenggara</i> )	Rp. 135.000.000,-
7	<b>Pembibitan rakyat</b>	Komplas	Rhee Loka Sumbawa	Memperluas gerakan rehabilitasi lahan dan hutan berbasis koalisi	Rp. 99.150.000,-
				<b>Total</b>	<b>Rp. 2.534.522.500,-</b>

**Lampiran 5 :**

**Mitra Samanta Yang Mendapatkan Dana Hibah di Nusa Tenggara 2008-2009**

<b>No</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>Telp Kantor/HP</b>	<b>EMAIL</b>
1	Lembaga Olah Hidup (LOH)	Jl. Osap Sima No. 20 Uma Sima Sumbawa Besar	0371-21953	<a href="mailto:loh@telkom.net">loh@telkom.net</a>
2	YTNS (Yayasan Tananua Sumba)	Jl. H.R. Horro – Matawai – Waingapu P.O. Box 103, Waingapu 87101	0387-62055	<a href="mailto:umbu-ytn@dps.centrin.net.id">umbu-ytn@dps.centrin.net.id</a>
3	Jaringan Kelompok Masyarakat Mutis Babnai	Desa Fatumnasi Kecamatan Fatumnasi Kabupaten TTS	0852253311828 081339436120	<a href="mailto:yfnomeni@yahoo.co.id">yfnomeni@yahoo.co.id</a>
4	Forum komunikasi kehutanan masyarakat/Mitra Samya	Jl. Sultan Salahuddin No. 17 – Tanjung Karang, Ampenan	0370 – 624232	<a href="mailto:mitrasamya@indo.net.id">mitrasamya@indo.net.id</a>
5	KONSEPSI (Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi)	Jl. Bung Hatta II/4 Mataram, 83231 P.O.box 1149	0370 - 627386	<a href="mailto:Konsepsi_01@telkom.net">Konsepsi_01@telkom.net</a> <a href="mailto:konsepsi_01@yahoo.co.id">konsepsi_01@yahoo.co.id</a>
6	KOSLATA	Jl. Surabaya No. 36 BTN Taman Baru Mataram	0370 - 625457	<a href="mailto:koslata@indo.net.id">koslata@indo.net.id</a> <a href="mailto:koslata02@yahoo.com">koslata02@yahoo.com</a>
7	Yayasan Ayu Tani	Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur	081338008705	<a href="mailto:ayutani@telkom.net">ayutani@telkom.net</a> <a href="mailto:thomuran@yahoo.com">thomuran@yahoo.com</a>
8	JMHS (Jaringan Madu Hutan Sumbawa)	Jl. Sultan Kaharuddin No. 46 Sumbawa Besar	(0371) 24035, 625783	<a href="mailto:jmhs@telkom.net">jmhs@telkom.net</a>
9	TRANSFORM (Training and Facilitation For Natural resources Management)	Jl. Merdeka Raya No. 37 Pagesangan Mataram	0370-623157	<a href="mailto:transform@indo.net.id">transform@indo.net.id</a>
10	SAMAWA CENTRE	BTN Bukit Permai Blok BB No. 32 Kelurahan Seketeng SBW Besar	(0371) 2706168	<a href="mailto:centersamawacenter@plasa.com">centersamawacenter@plasa.com</a>
11	SDM Kupang	Jl. Ade Irma Suryani II No. 30 A Walikota Baru Kupang	(0380) 825028	<a href="mailto:sdmkoe@telkom.net">sdmkoe@telkom.net</a> &
12	Kehutanan Multipihak (TMK) Sumbawa	Jl. Osap Sima No. 20 Uma Sima Sumbawa Besar	0371-21953	<a href="mailto:tim_mfp_sumbawa@telkom.net">tim_mfp_sumbawa@telkom.net</a> <a href="mailto:lp2lsem_ayani@telkom.net">lp2lsem_ayani@telkom.net</a>
13	GEMA ALAM	Jl. Pejanggih No 64 Pancor Lombok Timur	081933152316	<a href="mailto:wenn.gema_alam@yahoo.com">wenn.gema_alam@yahoo.com</a>

	(Gerakan Masyarakat Cinta Alam)			
14	P2M Politani Undana	Jalan Adisucipto Penfui Kupang	(0380) 881601	neonufa_6@plasa.com
15	Kehutanan Multipihak (TMK) Lobar	Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang-Gerung,	(0370) 681040	
16	SERBIO NUSRA (Yayasan Konservasi Biologi Nusa Tenggara)	Jln. Raya Watujaji – Jerebu'u ( Km 03 ) Langa, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada.,	( 0384 ) 2223309	paserbio@yahoo.co.id
17	ICCON Communication Centre On Nusa Tenggara	Jl. Ade Irma Suryani II No. 30 A Walikota Baru Kupang	0380- 825028	p_nai@telkom.net
18	Komplas	Desa Rhee Loka kecamatan Rhee, kab, Sumbawa NTB	(0371) 24035	<a href="mailto:loh@telkom.net">loh@telkom.net</a>